

ANALISIS KEPENTINGAN PERTAHANAN AUSTRALIA DALAM PENINGKATAN KERJA SAMA MILITER DENGAN INDONESIA TAHUN 2021 – 2024

Juni Fitriyan¹

1. Program Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

The Indo-Pacific is one of the regions in the world that experiences various dynamics of security and geopolitical issues, which causes unstable conditions for the region. The conflict in the South China Sea region and the rivalry between the United States and China are the two most prominent conditions in the Indo-Pacific region. In this condition, Australia is trying to overcome this by cooperating in the defense sector, with Indonesia as one of the strategic partner options in the hope. The defense relationship between the two countries has been established since the 1950s, which has continued to grow from year to year as evidenced by the signing of the Defense Cooperation Agreement (DCA) in 2024. This study uses a qualitative-descriptive approach, data collection in this study uses literature study techniques. Neorealism is used as a theory to discuss the problems raised in this study, national interests are the main concept in this study. The results of the study show that Australia has several interests in this cooperation. First, to carry out a balancing response to Chinese expansion to create stability in the region. Second, maintaining long-term relations with Indonesia which will have an impact on the development and improvement of economic aspects.

Keywords: Indo-Pacific, Defense Cooperation, National Interests, Geopolitics, Balancing

ABSTRAK

Indo-Pasifik merupakan salah satu kawasan di dunia yang mengalami berbagai dinamika isu keamanan dan geopolitik, yang mana hal ini menyebabkan kondisi yang tidak stabil bagi kawasan tersebut. Konflik di kawasan Laut Tiongkok Selatan dan rivalitas di antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi dua kondisi yang paling menonjol di kawasan Indo-Pasifik. Pada kondisi ini Australia berusaha untuk mengatasi hal tersebut dengan kerja sama dalam bidang pertahanan, dengan Indonesia sebagai salah satu pilihan mitra strategis diharapkan. Hubungan pertahanan kedua negara telah terjalin sejak tahun 1950-an, yang mana hal ini semakin berkembang dari tahun ke tahun dibuktikan dengan penandatanganan Defence Cooperation Agreement (DCA) pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan. Neorealisme digunakan sebagai teori untuk membahas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, kepentingan nasional menjadi konsep utama dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia memiliki beberapa dorongan kepentingan dalam kerja sama ini. Pertama, melakukan respons balancing terhadap ekspansi Tiongkok untuk menciptakan stabilitas di kawasan. Kedua, mempertahankan hubungan jangka panjang dengan Indonesia yang akan berdampak pada perkembangan dan peningkatan aspek ekonomi.

Kata Kunci: Indo-Pasifik, Kerja Sama Pertahanan, Kepentingan Nasional, Geopolitik, Balancing

PENDAHULUAN

Ilmu Hubungan Internasional secara mendasar membahas mengenai adanya pola hubungan yang terjadi di antara negara-negara di dunia, yang mana terdapat suatu bentuk sistem internasional yang menjadi sistem yang membentuk dan mengembangkan setiap pola hubungan antar negara di dalamnya. Pertahanan dan keamanan senantiasa

menjadi faktor yang paling penting bagi kedaulatan suatu negara, yang mana dalam keadaan ini pertahanan dan keamanan suatu negara menjadi penjamin besar bagi keberlangsungan kehidupan suatu negara sebelum negara tersebut mencapai target atau tujuan lainnya seperti pada aspek politik dan ekonomi. Oleh karena itu, peranan pasukan militer dalam suatu negara menjadi sangat penting dikarenakan mereka merupakan garda terdepan pertahanan dan keamanan sebuah negara. Pada perkembangan sistem internasional yang terjadi, pada akhirnya militer suatu negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk menjaga keberlangsungan hidup negaranya. Melainkan, mengalami perkembangan kewajiban secara sendirinya sehingga pasukan militer di seluruh dunia seharusnya berdiri pada prinsip “perdamaian dunia”.

Pendekatan neorealisme melihat bahwa sistem internasional membuat setiap negara perlu mempertahankan kehidupannya masing-masing (self-help), dalam hal ini perlu untuk meningkatkan kekuatan militernya masing-masing untuk dapat mempertahankan kedaulatannya. Pada perkembangan pendekatan tersebut, pada dasarnya memang suatu negara dituntut untuk dapat meningkatkan kekuatan militernya masing-masing dengan cara yang mandiri. Namun, pada akhirnya perkembangan membawa penjelasan pada negara yang dapat melakukan bentuk peningkatan kekuatan militer lainnya melalui bentuk kerja sama pertahanan. Walaupun, pada akhirnya kerja sama tersebut didasari oleh bentuk hubungan antar negara yang hanya didasari oleh kepentingan nasional dari masing-masing negara. Meskipun demikian, banyak negara-negara di dunia yang melakukan praktik kerja sama pertahanan dengan kepentingannya masing-masing untuk dapat bertahan dalam sistem internasional.

Australia menjadi salah satu negara di dunia yang tentu memiliki fokus besar terhadap aspek pertahanan dan keamanan, di mana kerja sama pertahanan (militer) pun menjadi salah satu pilihan yang mereka gunakan untuk dapat meningkatkan komponen terkait. Pada kondisi ini kita mengenal Australia sebagai salah satu bagian dari negara Barat sehingga mengikuti berbagai bentuk aliansi, yang mana kita dapat memahami bahwa bentuk aliansi sendiri mencakupi kerja sama dalam aspek pertahanan dan keamanan. Pembentukan AUKUS dan Quad menjadi contoh dari keterlibatan Australia dalam bentuk aliansi pertahanan, di mana masing-masing dari aliansi tersebut memiliki tujuannya masing-masing dalam mempertahankan kondisi aman bagi negara-negara anggotanya.

Selain bekerja sama dengan negara-negara yang merupakan aliansi secara politik dan sosial mereka, Australia juga melakukan kemitraan strategis dalam bidang pertahanan dan keamanan dengan negara lainnya di dunia. Pada kondisi ini Indonesia menjadi salah satu negara yang dipilih oleh Australia untuk dapat meningkatkan kondisi pertahannya, yang mana hubungan pertahanan kedua negara mulai dibentuk semenjak tahun 1954 dengan peningkatan pada pembentukan Defence Cooperation Program (DCP) sebagai dasar formal pada tahun 1968. Hubungan pertahanan kedua negara

mengalami berbagai dinamika yang cukup besar, di mana hubungan kedua negara sempat terganggu saat krisis Timor-Timur pada tahun 1990-an yang mengakibatkan berbagai permasalahan HAM di Indonesia. Namun setelah itu, pada tahun 2001 departemen pertahanan kedua negara kembali ingin memulai hubungan pertahanan mereka seperti semula.

Peristiwa Peristiwa Bom Bali tahun 2002 juga menjadi awal mula peningkatan kerja sama Indonesia dan Australia dalam penanggulangan terorisme, yang mana pada tahun 2004 ADF menyumbang operasi bantuan kemanusiaan terhadap Tsunami di Aceh. Pada tahun 2006 Indonesia dan Australia menandatangani perjanjian Lombok yang di dalamnya menekankan berbagai aspek termasuk kerja sama pertahanan, hal ini semakin diperkuat dengan penandatanganan pernyataan kerja sama pertahanan Indonesia-Australia pada tahun 2009 oleh Komandan ADF dan Komandan TNI. Pada tahun 2023, Indonesia dan Australia telah memulai perundingan naskah perjanjian melalui serangkaian pertemuan di Jakarta pada bulan Mei dan Desember, serta perundingan di Canberra pada bulan Agustus. Perundingan tersebut menemukan titik positif sehingga dilaksanakan penandatanganan Defence Cooperation Agreement (DCA) di antara Indonesia dan Australia pada tanggal 29 Agustus tahun 2024, Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto mengatakan bahwa ini merupakan kelanjutan daripada perjanjian Lombok tahun 2006.

Perkembangan hubungan pertahanan Indonesia dan Australia mengangkat berbagai permasalahan terkini, di mana salah satunya berada dalam konteks geopolitik saat kedua negara membahas mengenai stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Pada kondisi ini permasalahan di Indo-Pasifik menjadi sangat penting mengingat kedua negara berkomitmen untuk membentuk sebuah kawasan yang terbentuk sebagai wilayah dengan ekosistem internasional yang damai, stabil, dan sejahtera. Pada keadaan ini memang menjadi hal yang menarik untuk membahas mengenai kepentingan atau dorongan apa yang melatarbelakangi keputusan Australia dalam peningkatan kerja sama ini, sehingga dengan latar belakang ini peneliti mengangkat penelitian berjudul ***“ANALISIS KEPENTINGAN PERTAHANAN AUSTRALIA DALAM PENINGKATAN KERJA SAMA MILITER DENGAN INDONESIA TAHUN 2021 - 2024”***.

KERANGKA ANALITIK

Neo-realisme

Neorealisme percaya bahwa struktur sistem internasional bersifat anarki, yang berarti tidak ada kekuasaan di atas kekuasaan dan pemerintah di atas pemerintahan. Struktur sistem internasional ini membentuk kebijakan luar negeri suatu negara, tidak aneh jika negara yang mempunyai power yang lebih banyak memiliki pengaruh yang lebih besar (Waltz,1979). Pada akhirnya teori ini menjelaskan mengenai negara terdiri atas struktur sistemis yang masih memungkinkan kerja sama yang didasari kepentingan nasional (keuntungan relatif, zero sum game), begitu pula negara yang harus dipandang dari segala aspek strukturalnya (bukan hanya kekuasaan dan politik saja). Pada

anggapan teori ini sistem internasional bersifat anarki, dalam hal ini negara dituntut dapat survive dengan keadaan (sebagai suatu kepentingan nasional). Sistem internasional yang anarki menyebabkan tidak adanya suatu otoritas yang mengikat atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari yang lainnya, sehingga setiap negara didorong untuk mengedepankan prinsip *self-help* (Baylis, et.al, 2011).

Neorealisme menjadi sangat cocok mengingat peneliti membahas mengenai proses pencapaian kepentingan nasional yang dimiliki oleh Australia dalam aspek pertahanan dan keamanan, dalam hal ini Australia ingin meningkatkan pengaruh mereka melalui perkembangan kapabilitas militer yang ada. Pada kondisi ini kita mengetahui bahwa Australia merupakan salah satu negara *middle power*, namun dalam kondisi ini pembahasan mengenai Australia tidak akan terlepas dari dua negara yang merupakan mitra aliansi terbesarnya yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kerja sama yang dilakukan oleh Australia di kawasan bersama Indonesia menjadi sesuatu yang sangat menarik. Kondisi geopolitik dunia yang kian berkembang tentu menjadi salah satu pertimbangan di mana negara-negara di dunia saling melakukan kerja sama dalam bidang pertahanan, sehingga menjadi sangat menarik untuk membahas apakah kondisi tersebut menjadi salah satu dorongan bagi Australia untuk selalu meningkatkan kerja sama militer dan keamanan dengan Indonesia dari tahun ke tahun.

Seluruh pembahasan peneliti terkait permasalahan terkait sejalan dengan penjelasan anarki yang menyebutkan tidak ada suatu otoritas pusat yang dapat memaksakan kehendak terhadap suatu negara, dalam hal ini aktor-aktor di dalam dunia internasional berusaha untuk mencapai keuntungan relatif melalui hubungan kerja sama dengan negara lain. Namun, tentu saja hubungan yang dilaksanakan didasari oleh kepentingan nasional tertentu yang dimiliki oleh negara terkait untuk memaksimalkan kekuatan mereka, terkhusus dalam upaya peningkatan kapabilitas militer melalui hubungan kerja sama antar dua negara atau lebih.

Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional sebagai suatu konsep akan memiliki hubungan yang sangat erat dalam hubungan internasional negara- negara di dunia, yang mana negara sebagai aktor utama dituntut untuk dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan negaranya. Hans J. Morgenthau menjelaskan bahwa kepentingan nasional merupakan kemampuan minimum suatu negara dalam melindungi dan mempertahankan identitas politik, militer, serta kebudayaannya dari gangguan atau ancaman yang muncul dari negara lain. Hans J. Morgenthau akhirnya menyebutkan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat dua aspek penting yakni kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*), dua aspek tersebut digunakan dalam tindakan politik internasional suatu negara. Kepentingan nasional ini merupakan suatu tujuan fundamental dan menjadi faktor penentu akhir dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, dalam hal ini terdapat beberapa aspek penting yang menjadi kebutuhan negara seperti ekonomi, politik, pertahanan, militer, dan keamanan (Yani, Prawita, 2005). Pada definisi tersebut dijelaskan bahwa kepentingan nasional menyangkut hal-hal yang menjadi tujuan suatu

negara dalam beberapa aspek sosial seperti ekonomi dan politik, pada akhirnya kepentingan nasional menjadi landasan bagi pembuat kebijakan untuk merancang kebijakan luar negeri. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai Australia yang memiliki kepentingan untuk melakukan kerja sama dengan Indonesia.

Donald E. Nuechterlein melihat bahwa dalam perspektif hubungan internasional, tindakan suatu negara terhadap negara lain akan selalu didasari berbagai faktor yang bermuara pada kepentingan nasional. Pada akhirnya kepentingan nasional dipahami sebagai sebuah kebutuhan dan keinginan negara dalam berhubungan dengan negara lain yang didasari kondisi eksternal maupun internal, yang mana terdapat perbedaan dalam lingkungan eksternal dan internal dari suatu negara. Pada definisi ini lingkungan eksternal adalah pengaruh dari sistem dunia internasional, sedangkan internal dimaknai dengan kepentingan umum dari masyarakat dalam suatu negara. Pada akhirnya pengaruh dari lingkungan eksternal dan internal menjadi fokus bahasan Nuechterlein dalam melihat kepentingan nasional sebuah negara, yang mana lingkungan tersebut berpengaruh terhadap kebutuhan suatu negara.

Pada akhirnya, penjelasan ini sesuai dengan kepentingan nasional sebagai dasar suatu negara untuk membentuk kebijakan luar negeri. Selain itu, Nuechterlein berpendapat bahwa terdapat 4 (empat) dasar dalam kepentingan nasional suatu negara, yaitu: *Defence Interest* (Kepentingan Pertahanan), merupakan kepentingan suatu negara untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman yang berasal dari eksternal (luar) maupun dari internal (dalam); *Economic Interest* (Kepentingan Ekonomi), merupakan kepentingan suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nasional dari suatu negara; *World Order Interest* (Kepentingan Tatanan Dunia), merupakan kepentingan suatu negara dalam upaya mempertahankan stabilitas politik internasional dan sistem ekonomi internasional, dikarenakan hal ini menguntungkan bagi negara tersebut; dan *Ideological Interest* (Kepentingan Ideologi), merupakan kepentingan suatu negara untuk mempertahankan serta melindungi nilai-nilai maupun norma yang dipercayai dan digunakan oleh negara tersebut.

Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri pada dasarnya merupakan sikap, arah, nilai, maupun sasaran yang digunakan suatu negara dalam mempertahankan, mempromosikan, hingga mencapai kepentingan atau kebutuhan negaranya dalam suatu skema hubungan internasional. Pada akhirnya kebijakan luar negeri adalah perwujudan kebijakan yang digunakan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara, yang mana hal ini berkaitan dengan hubungan negara tersebut dengan negara lainnya (Nuechterlein, 1976). Pada akhirnya kebijakan luar negeri merupakan produk pembuat kebijakan suatu negara yang ditujukan untuk membahas beberapa permasalahan, dalam hal ini berkaitan dengan memajukan, mencapai, serta mempertahankan kepentingan nasional terkait. Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara merupakan hasil pengolahan pihak-pihak terkait (*decision maker*) untuk memenuhi kebutuhan negara, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibentuk perlu sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari

warga negara terkait. Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan suatu negara berisi metode atau cara mereka dalam memenuhi kebutuhan negara, sehingga kebijakan luar negeri menjadi sesuatu yang penting untuk dibentuk apabila suatu negara ingin melakukan kerja sama internasional atau bilateral sebagai konsekuensi dari kesulitan negara-negara di dunia untuk berkembang secara mandiri (*Self-Help*).

Security Dilemma

Security Dilemma atau Dilema keamanan sendiri adalah sebuah konsep yang didasarkan pada asumsi bahwa tindakan suatu negara yang meningkatkan kekuatan militernya dapat dilihat sebagai ancaman terhadap keamanan negara lain, yang dapat mengancam negara lain atau pada saat yang sama berada dalam posisi terancam. John Hertz mengemukakan konsep *security dilemma* dalam jurnalnya yang berjudul "*Idealist Internationalism and the Security Dilemma*" Hertz menyatakan bahwa suatu negara yang berada dalam system anarki harus memperhatikan keamanan negaranya, baik dari ancaman, serangan ataupun intervensi dari negara lain terutama dari negara tetangganya di Kawasan (Herz, 1950). Dilemma keamanan juga erat kaitannya dengan konsep deterrence, konsep deterrence dalam hubungan internasional dikenal sebagai sebuah konsep atau pandangan yang melihat negara sebagai sebuah aktor yang memiliki kekhawatiran atas ancaman yang menimpa negaranya, sehingga membuat negara harus melakukan tindakan untuk dapat mengatasi pihak yang menghadirkan ancaman tersebut. Dalam tulisannya yang berjudul "*Deterrence and International Conflict: Empirical Findings and Theoretical Debates*" Paul K. Huth menyebutkan bahwa konsep Deterrence mengacu pada suatu upaya yang dilakukan oleh suatu pihak yang berkaitan dengan strategi ancaman untuk menekan atau menghambat tindakan pihak lain dalam rangka melakukan suatu tindakan. Deterrence dipandang sebagai opsi tindakan yang diinterpretasikan melalui bentuk kebijakan politik luar negeri untuk mencegah pengaruh dari tindakan negara lain yang dianggap menimbulkan ancaman bagi negaranya.

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian tentunya memerlukan metode tertentu agar penelitian yang dilaksanakan menjadi lebih sesuai dengan tujuan, yang mana pada penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif menjadi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini dikarenakan memiliki fokus penelitian dan kajian yang terkait pada fenomena atau peristiwa sosial yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat sebagai subjek penelitiannya, pada pendekatan kualitatif terdapat berbagai aspek penelitian yang dibahas seperti perspektif, motivasi, aktivitas, sudut pandang, hingga perilaku masyarakat secara langsung yang diteliti secara mendalam menggunakan metode terkait. peneliti menggunakan deskriptif analisis sebagai tipe penelitian yang digunakan pada tulisan kali ini. Deskriptif analisis menjadi tipe penelitian yang memiliki metode penjelasan melalui catatan, analisis, penggambaran, hingga akhirnya dapat memberikan interpretasi yang baik terkait seluruh kondisi, fenomena, dan peristiwa yang tengah terjadi di masyarakat. Dalam hal ini deskriptif analisis menjadi tipe penelitian yang

memiliki tujuan untuk memperoleh informasi dan data secara aktual dan nyata, pada akhirnya peneliti melakukan beberapa proses pendekatan, penggambaran, serta analisis pada aspek-aspek terkait (Mardalis, 1955).

PEMBAHASAN

Perkembangan Hubungan Bilateral Australia dan Indonesia

Indonesia dan Australia merupakan dua negara yang secara geografis letaknya cukup berdekatan, yang mana kondisi ini tentunya mendukung adanya interaksi kedua negara dalam berbagai bentuk pola hubungan internasional. Ikatan kedua negara sebenarnya telah terjalin sejak tahun 1945, yang mana Australia sangat mendukung kemerdekaan Indonesia bahkan menjadi negara pertama yang mengirimkan misi diplomatik untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Hubungan kedua negara semakin membaik saat Soekarno memilih Australia untuk mewakili Indonesia dalam diskusi-diskusi di tingkat PBB, yang mana hal ini berbuah manis pada pengakuan kemerdekaan Indonesia tanggal 27 Desember 1949. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gary Quinlan bahkan menyebutkan bahwa tidak ada negara lain di Asia Tenggara yang sebegitu pentingnya bagi Australia selain dari Indonesia (Wibawa, 2020).

Pembukaan hubungan diplomatik penuh kedua negara dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1950 dengan menunjuk Dr. Oesman Sastroamidjojo sebagai Kuasa Usaha ad Interim yang sementara menempati Gedung Arsip Nasional di Canberra, kemudian Dr. Oesman kembali ke Indonesia pada tanggal 5 Juli 1950 dan digantikan oleh Oetojo Ramelan sebagai Duta Besar Penuh. Pada awal hubungan kedua negara, kantor perwakilan RI di Canberra masih berpindah-pindah. Pada akhirnya bulan Agustus tahun 1971 dibuat kantor permanen di daerah Yarralumla, yang mana ini merupakan daerah lingkungan perwakilan-perwakilan resmi dari negara asing yang berada di Canberra, Australia (Kemlu, 2020). Hubungan Indonesia dan Australia banyak mengalami pasang surut hubungan, pada periode tahun 1950 hingga 1960-an hubungan kedua negara memburuk karena kebijakan Indonesia yang ingin merebut kembali Irian Barat dan dengan adanya konfrontasi dengan Malaysia. Hubungan kedua negara sempat membaik setelah dibentuknya konsorsium lembaga keuangan yaitu Intern Governmental Group on Indonesia (IGGI) pada tahun 1967 untuk membantu pembangunan di Indonesia, selain itu dibentuk pula Cultural Agreement tahun 1968 untuk membantu program pertukaran budaya dan pendidikan yang berdampak positif hingga tahun 1970-an dari banyaknya kunjungan dari kedua negara (Wijayanti, 2019).

Hubungan kedua negara kembali retak saat Indonesia melakukan intervensi militer ke Timor Timur pada tanggal 7 Desember 1975, di mana tewasnya lima wartawan Australia di medan pertempuran Balibo, Timor Timur memperkeruh hubungan kedua negara. Kebekuan hubungan kedua negara mulai mencair saat Partai Buruh kembali berkuasa pada tahun 1983, hal ini semakin ditunjukkan dengan adanya kunjungan sepuluh menteri dari Australia pada kurun waktu tahun 1983 hingga 1986. Hubungan kedua negara semakin hangat pada tahun 1985 di mana Australia mengakui secara de jure integrasi Timor Timur ke Indonesia, namun tidak lama setelah

itu muncul ketegangan akibat artikel yang menyoroti bisnis keluarga Soeharto yang mulai mencair kembali pada tahun 1988. Pada saat itu Menteri Pertahanan Australia, Kim Beazly mendesak agar pemerintah memperbaiki hubungan pertahanan-keamanan dengan Indonesia, yang mana hal ini menjadi awal hubungan baik kedua negara hingga akhir masa orde baru.

Pada tahun 1989, Indonesia dan Australia membentuk institusi sendiri (*Australia-Indonesia Institute*) yang menunjang kontak rakyat kedua negara untuk mengimbangi hubungan lebih resmi kedua negara di tingkat pemerintahan. Selain itu, Australia juga mulai memberikan beasiswa guna melanjutkan pendidikan di negaranya melalui *Australian International Development Assistance Bureau* (AIDAB) yang kemudian berubah nama menjadi AUSAID yang kita kenal hingga saat ini (Wijayanti, 2019). Pada penjelasan di atas dijelaskan bahwa hubungan kedua negara mengalami berbagai pasang surut semenjak awal kemerdekaan hingga beberapa tahun sebelum era orde baru selesai, di mana beberapa kondisi seperti konflik Indonesia-Malaysia dan intervensi militer ke Timor Timur menjadi pengaruh terhadap dinamika hubungan kedua negara.

Pada tahun 1998 rezim orde baru di Indonesia jatuh dan digantikan oleh rezim reformasi yang ternyata berpengaruh pula pada hubungan dengan Australia, di mana peristiwa bom Bali menjadi awal di mana pemerintah Australia langsung mendesak agar Indonesia bertanggungjawab akan hal tersebut. Pada saat itu Australia langsung mengeluarkan travel warning kepada warga negaranya, namun perubahan kepemimpinan di Indonesia pun selanjutnya berpengaruh kepada hubungan kedua negara. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie tidak banyak kebijakan luar negeri yang berpengaruh pada hubungan kedua negara, namun pada masa Abdurrahman Wahid Australia merespons positif kebiakan perbaikan hubungan kedua negara yang renggang akibat permasalahan HAM di Timor Timur. Abdurrahman Wahid terus memberikan perhatian kepada Australia, bahkan mengemukakan gagasan untuk dialog bagi negara-negara di kawasan pasifik barat daya yang gagasan tersebut disambut baik oleh Australia (Hariyadi, 2001).

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri sejak tahun 2001, hubungan bilateral kedua negara dapat dikatakan cukup dingin, yang mana intervensi Australia dalam penyelesaian masalah di Timor Timur cukup merusak hubungan bilateral dengan Indonesia. Pemerintahan Megawati berupaya untuk dapat membangun dan menciptakan peran masyarakat Indonesia dalam kerja sama internasional, yang mana hal ini berorientasi pada pencapaian kepentingan nasional dan pemulihan citra dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kedua negara mulai memprioritaskan kerja sama dalam bidang kontra-terorisme, yang mana diharapkan kerja sama ini membangun hubungan harmonis kedua negara seperti pada tahun 2005 dengan membangun program

bantuan peningkatan pengembangan intelijen, serta pengawasan dalam menjaga keamanan pelabuhan di Indonesia (Wise, 2005).

Pada tahun 2005 Indonesia dan Australia membentuk *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* yang memperkuat fondasi kerja sama kedua negara, yang mana dalam kerja sama ini Australia memberikan bantuan untuk memulihkan wilayah Aceh dengan biaya yang mencapai 45 miliar Rupiah. Pada tahun 2006, ekspor manufaktur Australia ke Indonesia mengalami banyak peningkatan signifikan hingga tahun 2010. Pada akhir tahun 2010 kedua negara sepakat untuk meningkatkan kemitraan ekonomi yang lebih kuat dalam pembentukan *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA), yang mana hasilnya pada tahun 2011-2013 kegiatan ekspor kedua negara mengalami peningkatan yang diharapkan dalam bidang ekonomi dapat meningkatkan sektor perdagangan dan investasi (Marisa, 2020).

Hubungan Indonesia dan Australia sempat memburuk saat muncul isu penyadapan oleh Australia pada tahun 2009, di mana hal ini dilakukan untuk mengetahui strategi diplomasi yang dilakukan oleh presiden SBY saat itu. Oleh karena itu, pada tahun 2013 hubungan kedua negara mengalami ketegangan yang berdampak pada penangguhan kegiatan IA-CEPA dan bahkan Indonesia pun memanggil pulan Duta Besar Nadjib Riphath dari Canberra (BBC, 2007). Pada tahun 2014 Australia sangat merasakan dampak dari ketegangan ekonomi dengan Indonesia melalui trend ekspor yang menurun drastis, sehingga pada tahun 2016 Australia memprakarsai pengaktifan kembali IA-CEPA yang disusul dengan penandatanganan amandemen MoU kebijakan dan kerja sama teknis di antara Kementerian Keuangan Indonesia dengan Departemen Keuangan Australia. Pertemuan ini membahas pula penyelesaian negosiasi IA-CEPA, yang mana Australia melihat bahwa hal ini sangat penting untuk peningkatan kerja sama kedua pihak (Ditjen PPI, 2019).

IA-CEPA belum menemukan kesepakatan hingga tahun 2018, yang mana saat itu dimulai intensifikasi penyelesaian IA-CEPA yang dilakukan di tingkat ketua kelompok negosiasi. Pada pertengahan Agustus 2018 negosiasi diselesaikan di tingkat ketua kelompok, yang mana dilanjutkan dengan deklarasi penyelesaian IA-CEPA yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan kedua negara yang disaksikan oleh Presiden RI dan Perdana Menteri Australia. Pada tanggal 26 November 2019 parlemen Australia meratifikasi perjanjian IA-CEPA, yang mana ini diikuti dengan penandatanganan oleh Indonesia pada tahun 2020 (Septiari, 2019). IA-CEPA sendiri sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan kejuruan (VET) dan sektor pendidikan tinggi (Kemlu RI, 2019).

Sejak tahun 2020 hubungan di antara Indonesia dan Australia terlihat berjalan dengan baik, yang mana seperti sebelumnya dilihat dengan ratifikasi yang dilakukan terhadap kerja sama ekonomi IA-CEPA. Selain itu, pada bulan Februari tahun 2020 kedua kepala negara merayakan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan

Australia. Perayaan ini dibuktikan dengan Presiden Indonesia, Joko Widodo, mengunjungi Parlemen Australia di Canberra. Keduanya diagendakan akan bertemu untuk melakukan kunjungan kenegaraan serta menghadiri *Annual Leaders Meeting* (ALM) di Canberra, Australia (Azizah, 2020). Kerja sama di antara Indonesia dan Australia juga saling menguatkan dalam berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi. Indonesia dan Australia berkomitmen untuk menjalankan ekonomi terbuka. Kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama perdagangan, dan investasi (Mardiastuti, 2019).

Pada tanggal 5 Maret tahun 2024, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese di *Melbourne Convention and Exhibition Centre* (MCEC), yang mana dalam usia hubungan diplomatik yang telah berlangsung selama 75 tahun, kedua negara berkomitmen untuk memperkuat kerja sama strategis yang dibuktikan dengan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN- Australia sehari setelah pertemuan tersebut. Joko Widodo meneaskan posisi Australia sebagai mitra strategis Indonesia dan ASEAN di kawasan Indo-Pasifik, yang mana Indonesia mengangkat aspek perluasan kerja sama ekonomi dan pendidikan sebagai fokus dari peningkatan hubungan kerja sama kedua negara (Kemlu RI, 2024).

Dinamika Kondisi Geopolitik dan Kompleksitas Keamanan di Kawasan Indo-Pasifik

Indo-Pasifik merupakan sebuah istilah kawasan yang digunakan oleh dasar konsep geografis yang dipadukan dengan ekonomi, di mana kawasan ini menunjukkan perkembangan peluang geo-ekonomi yang besar dalam kondisi keamanan yang ada. Perkembangan geopolitik yang ada ternyata tidak hanya terbatas untuk wilayah Asia saja, melainkan berkembang ke seluruh dunia dengan pembentukan konstruksi kawasan tunggal yang bernama Indo-Pasifik. Gambaran wilayah tersebut meliputi penggabungan dari wilayah Samudera Hindia dan wilayah Pasifika Barat termasuk laut yang berdekatan di Asia Timur dan Asia Tenggara sebagai satu satuan konstruksi regional Tunggal (Kemlu RI, 2024). Setidaknya 35 persen cadangan gas dunia, 60 persen uranium, 40 persen emas, 80 persen dari semua cadangan intan, dan sejumlah besar berbagai zat mineral lainnya yang tentu menjadi sumber daya penting yang dimiliki di sana (West Perth, 2012).

Gesekan antar kepentingan muncul terjadi di antara beberapa negara di dunia menjadi salah satu ancaman yang besar dalam dinamika keamanan di kawasan Indo-Pasifik, dalam hal ini terutama konflik yang terjadi di antara negara-negara domestik kawasan Indo-Pasifik itu sendiri maupun meluas dengan negara-negara lain yang berada di luar kawasan. Saat ini isu keamanan terhadap stabilitas keamanan digadang-gadang akan meningkat, perebutan kekuasaan oleh para aktor yang berkontestasi akan mengganggu perdamaian di kawasan. Rivalitas besar di antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi salah kondisi yang meningkatkan kompleksitas keamanan di sini, sehingga menjadi semakin menarik untuk melihat berbagai “perebutan” pengaruh dan kekuasaan di kawasan tersebut dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat.

Pembentukan pakta pertahanan AUKUS oleh Australia, Inggris, serta Amerika Serikat dibentuk sebagai reaksi atas agresivitas Tiongkok dalam konflik di LTS (Laut Tiongkok Selatan). Pada konflik ini terlibat berbagai negara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam. Pada kondisi ini juga agresivitas Tiongkok mengancam Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang juga memiliki kepentingan di kawasan Indo-Pasifik, sehingga dengan perebutan pengaruh dan kepentingan Amerika Serikat-Tiongkok semakin meruncingkan konflik yang terjadi di kawasan Indo Pasifik. Pada dasarnya dalam konteks geopolitik AUKUS ingin menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Indo-Pasifik, namun perkembangan kapal selam nuklir mereka justru akan memberikan ancaman keamanan besar bagi Indo-Pasifik. Namun, di sisi lain tentu saja Australia mendesak bahwa kapal selam ini hanya sebagai bentuk *deterrence* untuk menyeimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh AS terhadap Tiongkok (Putro, 2021).

Pada saat ini AUKUS memang hadir sebagai pakta pertahanan yang bertujuan menyeimbangkan kekuasaan di Indo-Pasifik, namun kedatangan mereka sebaliknya dapat mengundang potensi eskalasi konflik karena penggunaan konsep arms race yang merupakan strategi kuno. Selain itu, kepemilikan delapan kapal selam bertenaga nuklir di Australia akan berdampak negatif bagi stabilitas keamanan di ASEAN yang merupakan wilayah sengketa dengan Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Pada kondisi ini ditakutkan akan terjadi pelanggaran pada traktat Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) yang disepakati negara-negara ASEAN pada tanggal 15 Desember 1995, walaupun Australia, Inggris, dan AS menyatakan bahwa mereka tidak akan melanggar kesepakatan yang juga ditandatangani oleh mereka ini (Putro, 2021).

Pada akhirnya terjadi peningkatan pengaruh dan kepentingan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik yang didukung oleh kekuatan ekonomi dan militer mereka, di mana bahkan terjadi adanya fokus yang meningkat terhadap kawasan Pasifik Selatan. Kondisi tersebut tentu seakan-akan menjadi tantangan terhadap Australia sebagai tuan rumah di kawasan tersebut, walaupun Tiongkok melakukan upaya pendekatan secara ekonomi untuk membuat mereka merasa aman dan berkembang dengan bantuan yang diberikan. Pada kondisi ini, bahkan Tiongkok menjadi peringkat ketiga setelah Australia dan AS yang memberikan bantuan dengan tujuan memperkuat perdagangan, kemampuan militer, pengembangan sumber daya alam, serta peningkatan pembangunan infrastruktur melalui bantuan yang diberikan (Glaser, 2014).

Kepentingan Australia dalam Peningkatan Kerja Sama dengan Indonesia Tahun 2021 – 2024

Pembahasan mengenai kepentingan nasional Australia dalam kerja sama dengan Indonesia ini dibahas melalui teori atau konsep kepentingan nasional yang disampaikan oleh Hans J. Morgenthau, menurutnya kepentingan nasional memiliki dua konsep utama yaitu kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*) yang dijadikan instrumen dalam melakukan hubungan luar negeri. Kepentingan vital Australia dalam peningkatan hubungan pertahanan dan keamanan dengan Indonesia berkaitan dengan

kondisi yang berkembang di kawasan Indo-Pasifik, pada kondisi ini kita melihat dari penandatanganan *MoU on and Emerging Cyber Technology*, serta *Arrangement on Defence Cooperation*. Pada pertemuan ini disempatkan pula pembahasan dalam kemitraan di kawasan, yang mana kerja sama ini perlu untuk penguatan arsitektur kawasan dalam memastikan kondisi stabilitas di kawasan Indo-Pasifik (Kemhan, 2021). Oleh karena itu, beberapa pembahasan mengenai kepentingan ini akan berkaitan dengan pembahasan kompolekstias geopolitik dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

Pada bagian-bagian di atas kita melihat bahwa Tiongkok memperluas pengaruhnya ke berbagai wilayah seperti Asia Tenggara dan Oseania, sehingga dengan ini Australia pun mencoba untuk mencegah agar Tiongkok tidak menguasai kawasan-kawasan tersebut sepenuhnya. Meskipun jarak Australia dan Tiongkok cukup jauh, namun kepemilikan nuklir mereka cukup mengancam terlebih dengan memburunya hubungan antara kedua negara. Kondisi ini mulai ditanggapi dengan Australia yang melakukan balancing di kawasan Indo-Pasifik dengan kerja sama yang dilakukan dengan Jepang melalui *Japan-Australia Reciprocal Access Agreement (RAA)*, kerja sama ini dilakukan sebagai respons dari kondisi keamanan yang memburuk di Indo-Pasifik. Secara lebih lanjut, didorong dengan adanya tindakan agresif Tiongkok pada perselisihan di LTS yang mengganggu stabilitas Kawasan (Wilkins, 2022).

Pada akhirnya melalui ini kita akan melihat kepentingan Australia dalam kerja sama dengan Indonesia berkaitan dengan upaya mereka untuk kembali menstabilkan kawasan di Indo-Pasifik, terutama disaat melihat bahwa kekuatan Tiongkok semakin besar dalam pengaruh dan kepentingan mereka yang didukung oleh sumber daya militer dan ekonomi mereka yang sangat kuat. Pada kondisi ini terlebih Australia melihat bahwa Tiongkok memiliki rencana yang sangat besar untuk mulai berekspansi ke kawasan Oseania, yang mana tentu ini seakan menjadi tantangan terbuka bagi Australia yang merupakan negara paling berpengaruh di sana. Oleh karena itu, terlihat bahwa kepentingan utama Australia dalam kerja sama ini adalah untuk melawan ekspansi besar Tiongkok.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Australia dalam kepentingannya adalah merubah Indonesia dan kawasan di sekitarnya (Asia Tenggara) sebagai buffer zone dari kekuatan dan pengaruh Tiongkok, yang mana hal ini dilakukan dengan Australia dan negara sekutunya seperti Amerika Serikat dan Inggris yang terus melakukan pendekatan kepada negara-negara tersebut. Pada kondisi ini, Australia memiliki kepentingan untuk dapat menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis mereka dalam melihat kondisi kompleks pada isu geopolitik dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik, yang mana dalam kondisi Indonesia dan negara-negara lainnya menjadi daerah penyangga bagi Australia dan sekutu. Hal ini sangat penting untuk menahan lajur ekspansi Tiongkok.

Kepentingan non-vital dapat kita sebut sebagai tujuan tingkat kedua dari pada kepentingan vital yang akan sangat berpengaruh pada keberlangsungan keamanan nasional suatu negara, namun kepentingan ini juga cukup memberikan hasil yang baik pada suatu negara walaupun manfaatnya akan terasa dalam jangka waktu yang panjang.

Pada akhirnya kerja sama yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia tidak hanya berguna atau bermanfaat bagi sektor pertahanan dan keamanan saja, melainkan terdapat beberapa bidang-bidang lainnya yang akan terpacu oleh adanya kerja sama pertahanan dan keamanan yang telah meningkat akibat hubungan mereka dalam aspek militer.

Kepentingan non-vital yang terlihat dari peningkatan kerja sama pertahanan dan keamanan di antara Australia dan Indonesia berada pada berbagai aspek lainnya, dalam hal ini dapat dalam bentuk aspek politik, sosial, dan ekonomi. Kepentingan Australia dalam kerja sama ini berada pada kedua negara yang berusaha untuk mempertahankan hubungan baik dalam jangka panjang, di mana hal ini dilakukan untuk menghindari kondisi yang sempat terjadi pada era orde baru. Pada saat itu Australia sempat merasa sangat dirugikan dari hubungan yang terputus dengan Indonesia, dalam kondisi ini seperti yang sempat terjadi pada pemutusan IA- CEPA kedua negara pasca krisis Timor-Timur dan permasalahan HAM yang sempat menyebabkan penangguhan hubungan kedua negara.

Relevansi Kepentingan Pertahanan Australia dalam Kerja Sama Militer dengan Indonesia

Kepentingan vital dan non-vital Australia dalam kerja sama pertahanannya dengan Indonesia memiliki relevansi dengan kondisi yang ada, dalam hal ini berfokus dengan kondisi instabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Pada kondisi ini kita memahami bahwa Australia melihat Tiongkok sebagai ancaman dikarenakan perkembangan kekuatan militer dan ekonominya di kawasan, selain itu Australia juga melihat sengketa Tiongkok dengan negara-negara lainnya di Laut Tiongkok Selatan sebagai salah satu bom waktu yang dapat pecah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, berbagai strategi yang dilakukan Australia termasuk dengan bekerja sama dengan Indonesia merupakan bentuk balancing terhadap dominasi dan ekspansi militer maupun ekonomi oleh Tiongkok di kawasan.

Pada akhirnya kepentingan yang dimiliki oleh Australia sangat relevan dengan kondisi keamanan dan geopolitik yang terjadi, di mana dalam hal ini terjadi penyeimbangan kekuatan dan ancaman yang saling dilakukan oleh Australia dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Pada kondisi ini kita dapat melihat adanya dilema keamanan dari peningkatan kekuatan militer yang terus- menerus dilakukan oleh kedua negara, yang mana sebenarnya hal ini akan mempertahankan status quo agar tidak terjadi konflik yang lebih besar lagi. Pada kondisi ini terlebih melihat Tiongkok yang berusaha memperlus pengaruh dan kepentingannya di kawasan Oseania, yang mana tentu ini dinilai sebagai tantangan secara langsung bagi Australia yang menjadi pemimpin di sana.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan utama untuk menganalisis bagaimana bentuk kepentingan pertahanan yang dimiliki oleh Australia dalam peningkatan kerja sama militer mereka dengan Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun (tahun 2021 hingga 2024), hal ini

didorong pula dengan berbagai faktor dan alasan lainnya yang mempengaruhi dinamika hubungan kedua negara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pada kondisi ini dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja sama pertahanan di antara Indonesia dan Australia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keinginan bersama untuk meningkatkan kekuatan militer masing-masing, karena pada penelitian ini ditemukan berbagai dorongan lainnya yang menyimpulkan bahwa terdapat kepentingan tersendiri yang dimiliki oleh Australia untuk mempertahankan hubungan dengan Indonesia sebagai negara yang sangat berpengaruh di kawasan. Kondisi ini berkaitan dengan Indo-Pasifik yang menjadi pengaruh besar dalam dorongan yang dimiliki oleh Australia.

Kepentingan nasional yang dimiliki oleh Australia dalam kerja sama pertahanan dengan Indonesia memiliki keterkaitan besar dengan kondisi di Indo-Pasifik, terutama dengan adanya ekspansi besar-besaran Tiongkok yang dilakukan melalui dukungan militer dan ekonomi mereka. Pada kondisi ini Australia melihat bahwa kebijakan Tiongkok merupakan ancaman besar di kawasan, yang di sisi lain Indonesia dianggap sebagai negara dengan pengaruh besar di kawasan. Oleh karena itu, kedekatan yang dibangun dengan Indonesia diharapkan dapat menjadikan negara-negara di Asia Tenggara sebagai zona penyangga dari perluasan pengaruh Tiongkok di sana. Kondisi ini didukung dengan sengketa negara-negara Asia Tenggara dengan Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Selain itu, terdapat kepentingan lainnya berupa mempertahankan hubungan jangka panjang kedua negara yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- 70 Years Indonesia-Australia (n.d). Kerja Sama Pertahanan Indonesia- Australia, diakses dari <https://www.70yearsindonesiaaustralia.com/kemitraan-pertahanan#%3A~%3Atext%3D1968%2Cterbang%20Nomad%20dan%20kapal%20patroli> pada tanggal 8 Februari 2025
- Albert, E. 2016. *Competition in the Indian Ocean*. Diakses dari Council on Foreign Relations: <https://www.cfr.org/background/competition-indian-ocean> pada tanggal 7 Februari 2025
- Azizah, N. 2020. *Presiden Hadiri Annual Leaders Meeting di Australia*. Diakses dari <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/yNLGMzvK-presiden-hadiri-annual-leaders-meeting-di-australia> tanggal 7 Februari 2025
- Baylis, J., Steve Smith, & Patricia Owens. 2011. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press.
- BBC News Indonesia. 2013. *BIN: Australia Menyadap Indonesia Sejak 2007*. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia tanggal 4 Januari 2025

- Brown, C. & Kirsten Ainley. 2005. *Understanding International Relations 3rd Edition*. New York: Palgrave Macmillan.
- Burchill, S. & Andrew Linklater. 2016. *Teori-Teori Hubungan Internasional*. Nusamedia: Bandung.
- Buzan, B. 1991. *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies In the Post-Cold War Era*. Great Britain: Harvester Wheatsheaf.
- Cohen, S. B. 2015. *Geopolitics: The geography of international relations*. Maryland: Rowman & Littlefield.
- Creswell, J. W. 2018. & J. David Creswell. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 5th Edition*. Sage Publications.
- Danim, S. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.
- Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional. 2019. *IA-CEPA Indonesia Australia Comprehensive Partnership Agreement*.
- Dougherty, J. E. & Robert L. Pfaltzgraff. 1997. *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey 4th Ed*. New York: Ed Addison Wesley Longman.
- Frey, M. 2009. "Decolonization and Dutch-American Relations". *Krabbendam*.
- Glaser, B. S. 2014. *CHINA'S GRAND STRATEGY IN ASIA*. Center for Strategic and International Studies: CSIS.
- Gunawan, I. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hariyadi. 2001. *Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Australia Pada Masa Setahun Pemerintahan Abdurahman Wahid*. Jakarta: Pusat Pengkaji Pelaaan dan Informasi DPR RI.
- Herindrasti, V. S. 2019. "Fenomena Indo-Pasifik Dan Diplomasi Indonesia". *Jurnal Asia Pacific Studies* (2019).
- Herz, J. H. 1950. "Idealist Internationalism and the Security Dilemma". *The Johns Hopkins University Press*. 2 (2).
- Holsti, K. J. 1995. *International Politics: A Framework for Analysis 7th ed*. Englewood Cliffs: Prentice Hall
- Huth, P. K. 1999. "Deterrence and International Conflict: Empirical Findings and Theoretical Debates". *Annual Review of Political Sciences*. 2 (1).
- Iriawan, S. 2018. *Diskursus Indo-Pasifik: Hegemoni Amerika, Persaingan Strategis, Hingga Transformasi Geopolitik Kawasan*. Mandala.

- Jemadu, A. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jervis, R. 1978. "Cooperation Under the Security Dilemma". *World Politics*. 30 (2)
- Kartasasmita, K. 1997. *Administrasi Internasional*. Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. 2024. *Indonesia-Australia Berkomitmen untuk Memperkuat Kerja Sama Strategis di Kawasan Indo-Pasifik*. Diakses <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5667/indonesia-australia-berkomitmen-untuk-memperkuat-kerja-sama-strategis-di-kawasan-indo-pasifik> tanggal 7 Februari 2025
- Kementerian Luar Negeri RI. 2020. *Ratifikasi Indonesia-Australia Comprehensive Agreement (IA-CEPA) Akan Dorong Kerja Sama Ekonomi antara Indonesia dan Australia*. Diakses <https://kemlu.go.id/melbourne/news/4701/ratifikasi-indonesia-australia-comprehensive-economic-partnership-agreement-ia-cepa-akan-dorong-kerja-sama-ekonomi-antara-indonesia-dan-australia> tanggal 6 Januari 2025
- Kementerian Luar Negeri RI. (n.d.). *Hubungan Bilateral Indonesia-Australia*. Diakses <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=54>, tanggal 4 Januari 2025
- Kementerian Pertahanan RI. 2021. *Menhan RI: Indonesia dan Australia Sepakat Meningkatkan DCA Menjadi Kerjasama Pertahanan Komprehensif*. Diakses dari <https://www.kemhan.go.id/2021/09/09/menhan-ri-indonesia-dan-australia-sepakat-meningkatkan-dca-menjadi-kerjasama-pertahanan-komprehensif.html> tanggal 7 Januari 2025
- Kementerian Pertahanan RI. 2024. *Menhan Prabowo Tanda Tangan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan RI-Australia di Akmil Magelang*. Diakses dari <https://www.kemhan.go.id/2024/08/29/menhan-prabowo-tanda-tangani-perjanjian-kerja-sama-pertahanan-ri-australia-di-akmil-magelang.html> tanggal 7 Februari 2025
- Khurana, G. S. 2017. *The „Indo-Pacific“ Concept: Restrospect and Prospect*. National Maritime Foundation.
- Mardalis. 1995. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiastuti, A. 2019. *RI-Australia Sepakat Kerja Sama Ekonomi, Keamanan hingga Peranan Perempuan*. Diakses <https://news.detik.com/berita/d-4812235/ri-australia-sepakat-kerja-sama-ekonomi-keamanan-hingga-peranan-perempuan> tanggal 7 Januari 2025

- Marisa, A. 2020. "Hubungan Bilateral Indonesia-Australia: Kepentingan Australia Dalam Meratifikasi Indonesia- Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement Tahun 2019". *Jurnal Transborders*. 4 (1).
- Michel, D. & R. Sticklor. 2012. *Indian Ocean Rising: Maritime and Security Policy Challenges*. Washington DC: Stimson.
- Mimbaro, A. 2017. Diakses dari <https://www.ikahan.com/wp-content/uploads/2013/07/Essay-2013-SECOND-Place-Aji-Mimbaro.pdf> tanggal 5 Januari 2025
- Moleong, L. J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif, edisi Revisi*. Bandung.
- Nuechterlein, D. E. 1976. „National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making“. *British Journal of International Studies*. 2.
- Putro, Y.B.Y.P. 2021. *Menyikapi Potensi Eskalasi Konflik Di Kawasan Indo-Pasifik Sebagai Dampak Dari Kesepakatan Aukus*. Diakses dari <https://setkab.go.id/menyikapi-potensi-eskalasi-konflik-di-kawasan-indo-pasifik-sebagai-dampak-dari-kesepakatan-aukus/> tanggal 8 Februari 2025
- Rizky, R. A. & Gunawan Undang. 2023. "Kerjasama Keamanan Indonesia-Australia dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme dan Radikalisme". *Jurnal Perceka*. 1 (2).
- Septiari, D. 2019. *IA-CEPA Deal to Take RI-Australia Ties to New Level*. Diakses dari <https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/04/ia-cepa-deal-to-take-ri-australia-ties-to-new-level.html> tanggal 8 Januari 2025
- Sudirman, A., Yusa Djuyandi & Clara Uli Rebecca. 2022. "Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia dalam Menanggulangi Ancaman Penyelundupan Manusia". *Jurnal Wacana Politik*. 7 (2).
- Sudiman, A., Yusa Djuyanti & Fajri Syahal Guna Pratama. 2023. "Memahami Dinamika Kerjasama Industri Pertahanan dalam Kerangka Indonesia Australia Defence Security Dialogue". *JPI: Journal of Political Issues*. 4 (2).
- Tang, S. 2010. *The Security Dilemma: A Conceptual Analysis. In A Theory of Security Strategy for Our Time*. New York: Palgrave Macmillan.
- Waltz, K. N. 1979. *Theory of International Politics*. California: Addison-Wesley Publishing Company.
- Wibawa, T. 2020. *Hubungan Indonesia dan Australia Capai Titik Balik yang Strategis Meski Banyak Kesalahpahaman*. Diakses dari

<https://www.abc.net.au/indonesian/2020-01-04/70-tahun-hubungan-diplomatik-australia-dan-indonesia/11839228> tanggal 3 Januari 2025

Wilkins, T. 2022. *Enhancing the “Special Strategic Partnership”: Australia and Japan Sign Reciprocal Access Agreement*. Diakses dari The Sasakawa Peace Foundation: https://www.spf.org/iina/en/articles/thomas_04.html tanggal 12 Februari 2025

Wise, M. 2005. *Indonesia’s War on Terror*. United State-Indonesia.

Yeni Wijayanti. “Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Tahun 1945-1995”. *Jurnal Artefak*.

Yani, Y. M. & Perwita. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosdakarya.